



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN Lapangan Banteng Timur No. 2-4 JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5200 FAKSIMILE (021/) 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-10701/PB/2015 18 Desember 2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pemberitahuan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai ASN Pusat

**Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Direktur/Deputi Administrasi
Kementerian/Lembaga (Terlampir)**

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Pusat.

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara efektif berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 2015.
2. Peserta program JKK dan JKM adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pejabat Negara.
3. Besarnya iuran JKK adalah 0,24% dari gaji peserta per bulan dan besaran iuran JKM adalah 0,30% yang dihitung dari gaji pokok peserta per bulan.
4. Manfaat JKK meliputi perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
5. Manfaat JKM diberikan bagi peserta yang wafat berupa santunan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa, yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang wafat.
6. Bagi pegawai PNS Pusat, iuran JKK dan JKM tidak dipotong dari gaji PNS bersangkutan, melainkan ditanggung oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini terpusat yang alokasi dananya ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Transaksi Khusus BA.999.99 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mendaftarkan seluruh PNS Pusat secara kolektif kepada PT Taspen (Persero) selaku badan penyelenggara berdasarkan basis data Gaji Pegawai Pusat (GPP) per Juli 2015 dan telah membayarkan premi/iuran mulai bulan Juli 2015.
8. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Kematian yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan PMK 208/PMK.02/2015 diundangkan tanggal 23 November 2015, peserta tetap berhak menerima manfaat dari Pengelola Program melalui mekanisme penggantian biaya (*reimbursement*) dari PT Taspen (Persero).

9. Berkenaan dengan hal tersebut, terkait detail layanan program serta mekanisme klaim agar berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) sebagai badan penyelenggara program dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo MS
NIP. 195903061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 10701 /PB/2015
Tanggal : 18 Desember 2015

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/
SEKRETARIS/DIREKTUR/DEPUTI ADMINISTRASI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian/Lembaga
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal BPK RI
4	Sekretaris Mahkamah Agung
5	Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
28	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
29	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
30	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah
31	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
32	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
33	Sekretaris Utama Badan Intelejen Negara
34	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
35	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Pangan
36	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
37	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian/Lembaga
38	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
41	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
42	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
43	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
44	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
45	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
46	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
47	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
48	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
49	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
50	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
51	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
54	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
55	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
56	Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
59	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
60	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
61	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
63	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
64	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
65	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
66	Sekretaris Utama Badan Nasional Penganggulangan Bencana
67	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
68	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
70	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
71	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
72	Sekretaris Utama Badan Nasional Penganggulangan Terorisme
73	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
74	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
75	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia